



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
NOMOR: W4-TUN2/459/OT.01.3/IV/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO,

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, diperlukan dukungan dari segenap jajaran aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
- c. bahwa pemilihan koordinator dan anggota tim berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

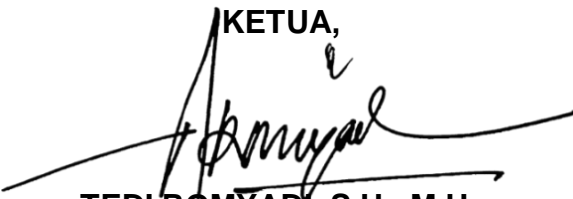
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
- Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 16 April 2018

KETUA,

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.
NIP. 196202041980121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
NOMOR: W4-TUN2/459/OT.01.3/IV/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

PENANGGUNG JAWAB : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
KETUA TIM : Anang Suseno Hadi, S.H.,M.H.
SEKRETARIS I : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
SEKRETARIS II : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

1. KOMPONEN MANAJEMEN PERUBAHAN

Koordinator : Sanny Pattipeilohy, SH.MH
Anggota : 1. Andi Jayadi Nur, SH.MH
2. Marfel Rompas, SE
3. Yanti Y. Wonok
4. Maria I. Ungga

2. KOMPONEN PENATAAN TATA LAKSANA

Koordinator : Baharuddin, SH.MH
Anggota : 1. Ventje R.E Sumual, SH.MH
2. Joel J.A Roeroe, SH
3. Joan Mentang

3. KOMPONEN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

Koordinator : Christin Andriani, SH.MH
Anggota : 1. Yanti Y. Wonok
2. Ventje R.E Sumual, SH.MH
3. Martha Sumale
4. Christie V.P Tuuk

4. KOMPONEN PENGUATAN AKUNTABILITAS

Koordinator : Zarina, SH
Anggota : 1. Jacob J.J Makalew
2. Ventje R.E Sumual, SH.MH
3. Martha Sumale
4. Joel J.A Roeroe, SH
5. Fernando Langi

5. KOMPONEN PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : Salman Khalik Alfarisi, SH
Anggota : 1. Maria S. Rampengan, SE
2. Alfred Z. Paat, SH
3. Jolla Tumbuan, SH
4. Samson B. Wongkar, SE

6. KOMPONEN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Anang Suseno Hadi, SH.MH

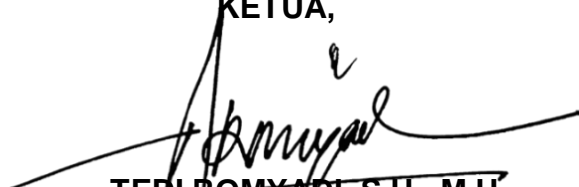
Anggota : 1. Oktofien W. Makalew, SH
2. Joel J.A Roeroe, SH
3. Marfel Rompas, SE
4. Valdy Telap, S.Kom

7. KOMPONEN HASIL : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN SERTA TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Mohammad Irfan Tahir, SH.MH

Anggota : 1. Maria S. Rampengan, SE
2. Joel J.A Roeroe, SH
3. Jaenal A. Sujoko, SH

KETUA,



TEDI ROMYADI, S.H., M.H.
NIP. 196202041980121001



